

PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN TALANG PUTRI PALEMBANG

Asnani¹, Dadang Hikmah Purnama², Dwi Putro Priadi³

^{1,2,3}Program Magister Pengelolaan Lingkungan Universitas Sriwijaya
Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Email: asnani0928@gmail.com

ABSTRAK, Salah satu masalah yang dihadapi wilayah perkotaan ialah masalah semakin sulitnya memenuhi kebutuhan perumahan bagi penduduk. Tingginya harga tanah di Pusat Kota menyebabkan masyarakat mencari areal permukiman di pinggiran kota, dengan lingkungan yang tidak memadai, sehingga menjadikan lingkungan tidak teratur, serta sarana dan prasarana yang sangat minim menjadikan lingkungan perumahan menjadi Kumuh.

Penelitian ini untuk mengetahui karakteristik fisik dan non fisik Kelurahan Talang Putri Palembang. Hasil identifikasi tersebut dijadikan pedoman dalam penataan kawasan kumuh di Kelurahan Talang Putri. Identifikasi kawasan kumuh tersebut dilakukan dengan beberapa kriteria yaitu kriteria fisik yang terdiri dari kepemilikan rumah, kondisi bangunan, jenis bangunan, kepadatan bangunan, MCK, air bersih, drainase, jalan lingkungan. Untuk proses analisis menggunakan teori Geoffrey dan untuk konsep penataan permukiman kumuh menggunakan teori Peter Kartz. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan secara umum karakteristik permukiman di Kelurahan Talang Putri Plaju terindikasi sebagai kawasan kumuh, di mana kondisi sarana dan prasarana yang buruk, kelayakan bangunan rendah, dan rendahnya penghasilan masyarakat sehingga motivasi untuk memiliki lingkungan dan rumah yang layak sangat rendah. Konsep penataan permukiman kumuh di Kelurahan Talang Putri yang direkomendasikan adalah dengan peremajaan kawasan, yaitu dengan pengembangan rumah bagi masyarakat setempat serta memperbaiki jalan lokal, drainase, TPS, sanitasi, dan akses air bersih. Dengan demikian penelitian ini hendaknya dapat menjadi dasar penyusunan rencana dalam proses penataan permukiman kumuh di Kelurahan Talang Putri Plaju sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

Kata Kunci : Kawasan kumuh, karakteristik, Penataan

PENDAHULUAN

Masalah yang dihadapi dalam pembangunan sekarang ini adalah pertumbuhan penduduk yang telah menimbulkan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa terutama pada wilayah perkotaan. Salah satu aspek yang sangat terasa adalah semakin sulitnya memenuhi kebutuhan perumahan atau tempat tinggal bagi penduduk. Hal itu disebabkan karena terbatasnya kemampuan untuk membangun perumahan yang layak serta semakin terbatasnya lahan perkotaan untuk membangun permukiman yang memenuhi syarat. Penduduk yang semakin bertambah disertai arus urbanisasi yang tinggi, menimbulkan masalah dalam penyediaan sarana permukiman, Tingginya harga tanah di pusat kota serta rendahnya pendapatan perkapita menyebabkan masyarakat cenderung

mencari areal permukiman di daerah pinggiran kota dengan lingkungan yang tidak memadai serta sarana penunjang yang sangat minim (Khomarudin, 1997:85). Keadaan seperti inilah yang akan menimbulkan dampak pemukiman kumuh di hampir seluruh kota di Indonesia.

Kota Palembang mempunyai daya tarik sendiri bagi masyarakat untuk tinggal menetap guna memperoleh kemudahan akses baik perdagangan, jasa dan pelayanan Pemerintahan. Hal ini turut berpengaruh dalam kebutuhan lahan permukiman. Kondisi seperti ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah guna memberikan dorongan untuk melakukan penataan permukiman kumuh di Kota Palembang khususnya di Kecamatan Plaju Kelurahan Talang Putri, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2010) Kelurahan Talang Putri Plaju merupakan Kawasan terbanyak terdapat permukiman kumuh untuk Kecamatan Plaju. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk

mengetahui bagaimana penanganan penataan yang sesuai dengan karakteristik yang ada di permukiman kumuh tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemukiman kumuh adalah kawasan pemukiman yang dikenal dengan kawasan padat dan tidak teratur. Kawasan ini dapat dikatakan sebagai kampung yang berada di perkotaan dengan kondisi yang buruk serta memprihatinkan. Pemukiman kumuh merupakan kawasan di perkotaan yang tumbuh dan berkembang secara spontan diluar kontrol tanpa sarana dan prasarana lingkungan. Keadaan penduduknya sangat padat dan berpenghasilan rendah, rumah-rumah dalam keadaan darurat yang dibangun dengan material bangunan yang tidak bertahan lama. (Dewanta, 1995 :11).

Menurut Khomarudin (1997:95) karakteristik permukiman kumuh mempunyai kondisi perumahan dengan kepadatan tinggi dan ukuran unit perumahan relatif kecil, atap rumah di daerah kumuh biasanya terbuat dari bahan yang sama dengan dinding. Karakteristik pemukiman kumuh yang paling menonjol adalah kualitas bangunan rumahnya yang tidak permanen, dengan kerapatan bangunan yang tinggi dan tidak teratur, prasarana jalan yang sangat terbatas, tidak adanya saluran drainase dan tempat penampungan sampah, sehingga terlihat kotor.

Menurut Khomarudin (1997:96), kriteria fisik permukiman kumuh antara lain:

1. Fasilitas umum kurang memadai
2. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume penggunaan ruang serta adanya kesemerautan tata ruang
3. Bahan bangunan utama seperti atap, dinding, lantai terbuat dari bahan alami yang tidak diproses, seperti daun untuk atap, bambu untuk dinding dan lantai tanah, Kontruksi bangunan tidak permanen.
4. Tidak dilengkapi sarana dan prasarana dasar seperti fasilitas (MCK).

Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak memiliki perencanaan sehingga tidak tertata, umumnya permukiman kumuh memiliki bentuk hunian yang temporer dengan menggunakan material seadanya berupa dinding papan kayu dan triplek. Biasanya hunian tersebut mengambil bahan bangunan dari sisa-sisa material proyek bangunan yang sudah tidak digunakan.

Menurut Suparlan (2001:62), kriteria fisik permukiman kumuh antara lain:

1. Fasilitas umum kurang memadai
2. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume penggunaan ruang serta adanya kesemerautan tata ruang
3. Bahan bangunan utama seperti atap, dinding, lantai terbuat dari bahan alami yang tidak diproses, seperti daun untuk atap, bambu untuk dinding dan lantai tanah
4. Kontruksi bangunan tidak permanen
5. Tidak dilengkapi sarana dan prasarana dasar seperti fasilitas untuk mandi, cuci dan kakus (MCK).

Sedangkan untuk kharakteristik non fisik Menurut Komarudin (1997:98), beberapa hal terkait timbulnya permukiman kumuh dan itu dapat ditinjau dari segi ekonomi masyarakat yang bermukim di kawasan permukiman kumuh, beberapa karakteristiknya adalah :

1. Masyarakat berpenghasilan rendah
2. Berprofesi sebagai pengangguran, pengemis, buruh bangunan, pemulung, penjual dagangan pikul dan penjual dagangan gerobak dorong.

Karakteristik Sosial menurut Komarudin (1997:101)

Beberapa karakteristik sosial dalam permukiman kumuh adalah :

1. Rata-rata jumlah anggota keluarga relatif banyak
2. Ikatan keluarga yang erat
3. Biasanya ditandai oleh banyaknya perilaku menyimpang dan tindak kriminal.

Parameter Permukiman Kumuh

Parameter pemukiman kumuh berdasarkan dari indikator kawasan permukiman kumuh menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat No 02 /PRT/ M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari parameter fisik dan non fisik. Adapun secara fisik terdiri dari kepemilikan rumah, kondisi bangunan, jenis bangunan, kepadatan bangunan, air bersih, MCK, drainase, dan jalan lingkungan. Sedangkan, untuk kondisi Non fisik terdiri dari kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Parameter Permukiman Kumuh Secara Fisik

1. Kepemilikan Rumah

Masyarakat di permukiman kumuh umumnya tinggal di permukiman yang tidak jelas status tanahnya, tidak memiliki sertifikat, dan berdiri di atas tanah Negara.

2. Kondisi Bangunan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung meliputi :

- a. Ketidakteraturan bangunan
- b. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
- c. Kondisi bangunan yang buruk, bahan bangunan bersifat semi permanen seperti dinding dari kayu, daun untuk atap dan berlantai tanah.

3. Kepadatan Bangunan

- a. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi
- b. Bangunan tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang

4. Kondisi Air Bersih

- a. Ketidaktersediaan akses air minum
- b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu
- c. Tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan

5. MCK

Permukiman kumuh umumnya tidak dilengkapi sarana dan prasarana dasar seperti fasilitas untuk mandi, cuci dan kakus (MCK).

6. Drainase

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan:

- a. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air
- b. Ketidaktersediaan drainase
- c. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan
- d. Tidak terpelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya
- e. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

7. Jalan Lingkungan

Kriteria kekumuhan di tinjau dari jalan lingkungan mencakup :

- a. Kondisi jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan
- b. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk
- c. Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman
- d. lebar jalan yang tidak memadai
- e. kelengkapan jalan yang tidak memadai

- f. Prasarana jalan di permukiman kumuh umumnya sangat terbatas berupa gang-gang sempit yang berliku-liku.

8. TPS

- a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis
- b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
- c. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.

Parameter Permukiman Kumuh Secara Non Fisik

1. Kondisi Sosial

- a. Tingkat pendidikan masyarakat di permukiman kumuh umumnya masih rendah
- b. Banyaknya tindak kriminal dan perilaku menyimpang

2. Kondisi Ekonomi

- a. Masyarakat berpenghasilan rendah
- b. Berprofesi sebagai pengangguran, pengemis, buruh bangunan, pemulung, penjual dagangan pikul dan penjual dagangan gerobak dorong

3. Budaya

- a. Kebiasaan penduduk membuang sampah sembarangan
- b. Kebiasaan membuang hajat di sungai, pekarangan atau tempat terbuka lainnya

PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH

Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 02 /PRT/ M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu:

1. Pemugaran
2. Peremajaan
3. Permukiman Kembali

Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

- a. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan
- b. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Teori yang Berkaitan

Geoffrey Broadbent dalam buku "*Design in Architecture*" (1973: 83), mengemukakan suatu pemahaman, bahwa: untuk perwujudan arsitektur, terdapat 3 (tiga) aspek atau sistem yang perlu ditinjau, yaitu: lingkungan, bangunan dan manusia. Aspek manusia meliputi aspek perilaku manusia di dalamnya dan mempengaruhi tatanan susunan ruang sehingga membentuk program ruang.

Pada aspek bangunan meliputi pengembangan tapak, bentuk bangunan, system struktur, dan material. Pada aspek lingkungan meliputi blok plan dan system kontrol lingkungan beserta faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi desain bangunan. Teori Geoffrey Broadbent ini nantinya dapat digunakan dalam proses analisis.

The New Urbanism menurut Peter Kartz dalam Marwati Gundhi (2008:34), bertujuan untuk menciptakan konsep perencanaan lingkungan permukiman yang mempunyai visi ke masa depan dengan mengkombinasikan keadaan masa lampau, sekarang dan masa yang akan datang.

Figure Ground Theory, Figure/ground adalah alat yang sangat baik untuk mengidentifikasi sebuah pola-pola sebuah tata ruang permukiman serta mengidentifikasi masalah keteraturan massa/ruang permukiman (Zahnd, 1999:79). Teori ini membantu peneliti dalam proses analisa lingkungan.

Beberapa alternatif penanganan permukiman kumuh yang telah dilaksanakan di Negara Thailand tersebut, yaitu:

1. *On-site Upgrading*, yaitu penataan kembali atau peremajaan permukiman kumuh tanpa memindah lokasikan tempat tinggal yang terdapat di permukiman tersebut, seperti pembangunan dan perbaikan tempat tinggal, lingkungan permukiman, jalan lingkungan dan ruang terbukanya. Dan proses ini melibatkan masyarakatnya secara langsung.

2. *On-site Reblocking*, yaitu penataan kembali atau peremajaan permukiman kumuh dengan mengubah pola permukiman dari tidak teratur menjadi teratur dengan block-block

perumahan. Upaya ini untuk menata perumahan yang tidak teratur dan membangun jalan utama, jalan lingkungan, saluran drainase, jaringan listrik dan jaringan air bersih.

3. *On-site Reconstruction*, yaitu mengubah total permukiman yang tidak teratur dengan membongkar dan membangun kembali permukiman yang sama di lokasi yang sama. Tahapan pertama adalah persetujuan masyarakat dipemukiman kumuh tersebut untuk dilakukan pemugaran dan pembangunan kembali serta dana yang dialokasikan untuk pemugaran dan pembangunan tersebut sudah harus ada.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Palembang, Berdasarkan survei awal dan data dari Kecamatan Plaju, Kelurahan Talang Putri Palembang termasuk kawasan kumuh.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian yaitu warga yang tinggal di RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, RW 06, RW 07 dan RW 08 yang tinggal di Pemukiman Kelurahan Talang Putri Plaju Palembang yang dapat diuraikan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Populasi Penelitian

NO	RW	JUMLAH KK
1.	RW 01	306
2.	RW 02	333
3.	RW 03	305
4.	RW 04	433
5.	RW 05	713
6.	RW 06	491
7.	RW 07	573
8.	RW 08	588
Jumlah Populasi		3742

Sumber: Kelurahan Talang Putri Palembang (2016)

Pada tabel dapat diketahui jumlah populasi pada penelitian ini adalah 3742 Kepala Keluarga.

Hal ini diambil melalui data Kelurahan Talang Putri Plaju Palembang.

Sampel

Pengambilan masing-masing sampel pada penelitian kuantitatif dengan menggunakan *proporsional stratified random sampling*, yaitu populasi dibagi atas beberapa bagian (subpopulasi). Dalam menentukan

besarnya sampel penelitian, peneliti berpedoman pada rumus Slovin (dalam Setiawan, 2007).

$$N = \frac{n}{1 + (n \cdot (d)^2)}$$

Dimana

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

d = toleransi kesalahan dalam

menetapkan sampel 5% atau 0,5 dengan taraf kepercayaan 95%.

$$\text{Sampel penelitian : } N = \frac{n}{1 + (n \cdot (d)^2)}$$

$$N = \frac{3742}{1 + (3742 \cdot (5\%)^2)} = 361$$

Populasi dari data kelurahan Kelurahan Talang Putri terdapat 3742 Kepala Keluarga, Dari hasil perhitungan Slovin tersebut jumlah sampel yang dihasilkan adalah 361 responden. Sehingga yang akan dijadikan sampel penelitian sebanyak 361 kepala keluarga dengan menggunakan metode survei random acak. Pengambilan masing-masing sampel pada penelitian metode kuantitatif menggunakan *proporsional stratified random sampling*, yaitu pada setiap Rukun warga (RW) berdasarkan jumlah Kepala Keluarga yang berada pada daerah tersebut yang dapat diuraikan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.2. Sampel Penelitian

No	RW	Jumlah Populasi	Perhitungan sampel	Jumlah Sampel
1	RW 01	306	$(306/3742) \times 361 = 29$	34
2	RW 02	333	$(333/3742) \times 361 = 32$	32
3	RW 03	305	$(305/3742) \times 361 = 30$	33
4	RW 04	433	$(433/3742) \times 361 = 42$	42
5	RW 05	713	$(713/3742) \times 361 = 60$	60
6	RW 06	491	$(491/3742) \times 361 = 47$	47
7	RW 07	573	$(573/3742) \times 361 = 55$	55
8	RW 08	588	$(588/3742) \times 361 = 57$	58
Total				361

Sumber: dari hasil perhitungan sampel penelitian

Alat yang Digunakan

Peralatan yang digunakan adalah Kamera digital, perekam digital, instrument Penelitian, Komputer dengan perangkat lunak ArcGIS.

Teknik Pengumpulan Data

Data Primer

Data primer dalam metode penelitian kuantitatif ini diperoleh dari Responden dengan melakukan survey langsung yang dilanjutkan dengan pembagian angket (kuesioner) kepada responden.

Data Skunder

Pengumpulan data-data yang berkaitan dengan penelitian Penataan Permukiman Kumuh di Kelurahan Talang Putri Palembang berupa (Peta topografi kelurahan plaju dari BAPPEDA Kota Palembang, data tingkat kemiskinan penduduk Kota Paju dari dinas sosial, data jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan dari Dinas Ketenagakerjaan, data tentang potensi kelurahan dari Kantor Kelurahan Talang Putri Palembang).

Analisis Konsep Penataan Kawasan Kumuh di Kelurahan Talang Putri Palembang.

Konsep Penataan kawasan kumuh di Kelurahan Talang Putri Paju Palembang dilakukan secara teknis, sosial kelembagaan dan institusi. Dalam melakukan konsep penataan kawasan kumuh di Kelurahan Talang Putri dengan melakukan:

1. Menyiapkan dokumen *master plan engineering design* yang memuat komponen-komponen prasarana fisik yang sangat dipengaruhi oleh partisipasi penduduk serta sosial ekonomi masyarakat.
2. Mengidentifikasi karakteristik wilayah penangan dan dianalisis strategi penanganannya yang meliputi pengangan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya.
3. Mengidentifikasi konsep penanganan dan pengembangan kawasan di lihat dari permasalahan yang terdiri dari Fisik dan Non Fisik
4. Menganalisis rencana struktur dan pola ruang kawasan Kelurahan Talang Putri Paju Palembang.
5. Menganalisis indikasi program kegiatan dalam penanganan dan permukiman kumuh di Kelurahan Talang Putri Paju Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, peneliti akan melihat daerah pada Kecamatan Paju Kelurahan Talang Putri Paju Palembang, Keadaan

geografis Kelurahan talang putri berada di daerah dataran rendah dengan jumlah penduduk sebanyak 15.788 jiwa, laki-laki sebanyak 8042 orang dan perempuan sebanyak 7.746 orang, dengan jumlah KK sebanyak 3.785 KK, dengan satu sungai yang kondisi air sungai yang keruh terdapat endapan lumpur dan tidak memenuhi baku mutu air, dan luas daerah rawa 20 ha, luas wilayah permukiman 147 ha, dengan keadaan iklim 60 mm dan kelembaban 90% (data Kelurahan Talang Putri 2016).

Parameter Pemukiman Kumuh Secara Fisik Kepemilikan Rumah

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, status kepemilikan Permukiman di Kelurahan Talang Putri kecamatan Plaju 54% merupakan milik pribadi sedangkan 46% Permukiman sewa. Masalah yang terjadi disana adalah permukiman tersebut berdiri diatas lahan milik perusahaan PT.PERTAMINA. Sehingga banyak diantara mereka tidak memiliki bukti kepemilikan tanah.

Berdasarkan hasil wawancara 75% warga di Kelurahan Talang Putri Plaju tidak memiliki bukti kepemilikan lahan sedangkan 25% hanya memiliki bukti berupa PBB. Berikut ini adalah diagram kepemilikan rumah di Kelurahan Talang Putri plaju.

Jenis Bangunan

Hasil penelitian didapatkan kondisi fisik permukiman di Kelurahan talang putri 70% konstruksi bangunan semi permanen dan terbuat dari bahan bangunan yang alami seperti daun untuk atap, kayu untuk dinding, bahkan banyak juga di temui bangunan rumah yang masih berlantai tanah, namun terdapat juga beberapa bangunan yang beratap seng. Sedangkan untuk bangunan yang permanen masyarakat di Kelurahan Talang Putri menggunakan bahan bangunan dari batako dengan lantai tehel dan konstruksi atap seng.

Kondisi Bangunan

Setelah dilakukan observasi, kondisi bangunan di Kelurahan Talang Putri Plaju berkonstruksi semi permanen, berdinding kayu dan berlantai tanah, dengan luas rumah rata-rata 3 x 4 meter dengan jumlah penghuni lebih dari tiga orang. Selain itu bangunan pada permukiman tersebut tidak memiliki ventilasi, fungsi ruang yang multifungsi (Ruang tamu digunakan untuk tidur pada malam hari) dan beberapa rumah menjadikan ruang tamu untuk

dapur dan ruang tidur tanpa ada sekat pembatas. Hal ini menyebabkan kondisi bangunan di Kelurahan Talang Putri semakin kumuh dan tidak sehat serta menjadikan permukiman tidak layak huni, Seperti terlihat pada gambar dibawah ini dimana satu ruang digunakan untuk tempat multifungsi yaitu sebagai dapur, ruang tidur dan ruang tamu.

Kepadatan Bangunan

Kondisi kepadatan bangunan pada kawasan permukiman Kelurahan Talang Putri Plaju tergolong padat dengan kondisi eksisting jumlah bangunan rumah lebih dari 50 unit per Ha dengan jarak antar bangunan tidak tentu satu sama lain disebabkan masih adanya lahan kosong, rawa yang berada di daerah kelurahan Talang Putri tersebut. Tata letak bangunan yang tidak teratur dan tidak memperhatikan estetika yang ada serta tidak adanya pengelolaan sampah yang baik, hal ini terlihat dari banyaknya tumpukan sampah pada jalan lingkungan, menyebabkan kondisi permukiman menjadi terlihat kumuh.

MCK

Berdasarkan hasil wawancara, dan survei lapangan kebanyakan Permukiman di wilayah Talang Putri Kecamatan Plaju memiliki fasilitas Pribadi untuk aktivitas MCK. Sebanyak 92% permukiman memiliki fasilitas MCK pribadi, sedangkan yang tidak memiliki fasilitas MCK hanya 8%. Akan tetapi kondisi MCK yang dimiliki oleh warga di Kelurahan talang putri rata-rata berada di luar rumah dan masih belum memenuhi standar layak.

Air Bersih

Berdasarkan hasil survei dan wawancara langsung 70 % masyarakat di Kelurahan talang putri plaju memenuhi kebutuhannya akan air melalui sumur terbuka, dimana kondisi air sumur tersebut masih jauh dari standar layak, yaitu berwarna kecoklatan, berbau besi dan terdapat beberapa sampah plastik. Hal ini dikarnakan kondisi sumur warga di Kelurahan talang putri tidak di lengkapi bibir sumur dan pada saat hujan menyebabkan kotoran terbawa oleh air hujan. Sedangkan untuk jarak dari sumber air (sumur) ke kakus kurang dari 10 M.

Drainase

Kondisi drainase di Permukiman Kumuh Kelurahan Talang Putri kurang memadai. Hal ini terlihat dari tidak adanya saluran air, tidak adanya bangunan saluran air (Selokan) sehingga air buangan limbah warga maupun air hujan tertampung di beberapa kolam

diwilayah permukiman tersebut. Aliran air tersebut masih berupa saluran drainase alami. Selain untuk membuang limbah cair, Kolam tersebut juga di gunakan warga untuk membuang limbah padat.

Jalan Lingkungan

Kondisi akses jalan lingkungan pada Permukiman kumuh di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju 74% kondisi jalan merupakan jalan tanah, dan 26% lainnya merupakan jalan semen, Sedangkan jalan aspal tidak ada.

Kondisi Persampahan

Kondisi persampahan di permukiman kumuh Kelurahan Talang Putri tidak memadai, hal ini terlihat dari tidak adanya sarana pembuangan sampah baik TPA maupun tong sampah milik warga pribadi. Belum adanya pengelolaan sampah yang baik menjadi salah satu unsur penentu timbulnya kekumuhan. Berdasarkan hasil penelitian masyarakat di permukiman kumuh Kelurahan Talang Putri Plaju 58% tidak memiliki sarana tempat pembuangan sampah, masyarakat membuang sampah dengan cara dibuang secara langsung di pekarangan, tindakan pembuangan sampah secara langsung di pekarangan tanpa dilakukannya pewadahan terlebih dahulu dilatarbelakangi oleh sikap individu atau warga yang menganggap bahwa sampah yang di buang di sekitar rumah nantinya akan terurai sendiri. Sedangkan 42% dengan cara dikumpulkan terlebih dahulu kemudian di bakar, pemusnahan sampah yang dikumpulkan dari kolong rumah umumnya dilakukan dengan mengangkat sampah tersebut kemudian diangkut ke lahan atau tanah kosong di sekitar rumah, dikeringkan dalam satu sampai dua hari dan kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar, selain tanpa melakukan proses pengangkutan sampah, tujuan lainnya adalah untuk mematikan atau mengusir nyamuk.

Parameter Pemukiman Kumuh Secara Non fisik

1. Sosial :

Pendidikan

Tingkat pendidikan di Kecamatan Plaju Kelurahan Talang Putri masih rendah, hal ini dikarenakan pendidikan orang tua yang rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi tidak mampu. Di sisi lain, pada kenyataannya warga di Kelurahan talang putri yang rata-rata hanya berpendidikan Sekolah Dasar bahkan banyaknya warga yang tidak

mengejam bangku pendidikan sama sekali sehingga masih banyak warga di Kelurahan talang putri yang masih buta huruf.

Keadaan Kamtibmas

Selain faktor fisik, karakteristik Permukiman kumuh juga ditinjau dari segi non fisik salah satunya adalah tingkat rawan akan tindak kriminal, daerah Permukiman kumuh di Talang Putri Kecamatan Plaju juga rawan terhadap tindak kriminal. Berdasarkan penelitian mengenai tindak kriminal di daerah Permukiman talang putri, setidaknya selama 1 bulan sekali terjadi tindak kriminal. Wujud perilaku menyimpang di permukiman Kelurahan talang putri ini berupa mabuk-mabukan, minum obat terlarang, adu ayam, begadang dan berjoget di pinggir jalan dengan musik keras sampai pagi, perkelahian, bahkan lebih lanjut perilaku menyimpang tersebut mengarah kepada tindakan kejahatan (kriminal) seperti pencurian, penipuan, penodongan, bahkan pembunuhan.

2. Ekonomi

Pada umumnya sebagian besar penghuni lingkungan permukiman Kelurahan talang putri mempunyai tingkat pendapatan yang rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena terbatasnya lapangan kerja yang ada.

Kondisi ekonomi Masyarakat Kelurahan Talang Putri

Kelurahan	Pra Sejahtera	Sejahtera I	Sejahtera II	Sejahtera III	Sejahtera III+
Talang Putri	1.363	970	726	482	242

Sumber: Kelurahan Talang Putri Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa di kelurahan talang Putri keluarga pra-sejahtera lebih banyak dibandingkan dengan keluarga sejahtera. Hal ini mengindikasikan bahwa kawasan tersebut kumuh, dimana pada tabel di atas jumlah masyarakat Kelurahan Talang Putri memiliki penduduk dengan jumlah terbanyak dalam kondisi pra sejahtera.

Jenis Pekerjaan

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat pada wilayah di permukiman kumuh Kelurahan Talang Putri pada umumnya berada pada sektor informal melakukan aktivitas ekonomi informal, baik

yang legal (buruh, asongan, tukang becak, sopir, berdagang atau membuka warung rumahan, pemulung, pengamen) maupun yang ilegal (penjaja seks komersial, gelandangan dan pengemis).

3. Budaya

Dalam kehidupan keseharian masyarakat di Permukiman kumuh Kelurahan Talang Putri mereka memperlihatkan adat kebiasaan dan perilaku yang seragam terutama dalam berbagai tindakan terhadap lingkungan. Misalnya cara membuang sampah, membuang hajat, dan corak dalam pergaulan. Kurangnya fasilitas-fasilitas infrastruktur yang cukup, maka dalam hal pembuangan sampah, mereka membuangnya secara langsung kesungai, pekarangan rumah, karena tidak terdapat fasilitas untuk pembuangan sampah. Sampah-sampah banyak yang menumpuk sampai sehari-hari bahkan berminggu-minggu sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap serta MCK yang memenuhi standar kesehatan.

Konsep Penataan Permukiman Kumuh

Untuk menangani permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Talang Putri berdasarkan hasil identifikasi karakteristik fisik dan non fisik, serta berdasarkan dari indikator penetapan kawasan kumuh Model penanganan permukiman kumuh dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi, status tanah, kepadatan bangunan, dan tingkat kekumuhan, sehingga konsep penanganan yang dapat direkomendasikan adalah peremajaan kawasan. Peremajaan itu sendiri diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas melalui kegiatan perombakan dengan perubahan yang mendasar dan penataan yang menyeluruh terhadap kawasan hunian yang tidak layak huni tersebut. Upaya yang dilakukan dalam rangka peremajaan:

1. Bersifat menyeluruh dalam suatu kawasan permukiman yang sangat tidak layak huni, yang secara fisik sering tidak sesuai lagi dengan fungsi kawasan semula.
2. Difokuskan pada upaya penataan menyeluruh terhadap seluruh kawasan hunian kumuh, rehabilitasi dan atau penyediaan prasarana dan sarana dasar, serta fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang menunjang fungsi kawasan ini sebagai daerah hunian yang layak.

3. Memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh rangkaian kegiatannya.

Langkah-langkah peremajaan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Talang Putri Plaju dengan status tanah legal Untuk model penanganannya dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu:

Model Land Sharing

Yaitu penataan ulang di atas tanah/lahan dalam penataan kembali tersebut, masyarakat akan mendapatkan kembali lahannya dengan luasan yang sama yaitu sebagaimana yang selama ini dimiliki/dihuni secara sah, dengan memperhitungkan kebutuhan untuk prasarana umum (jalan, saluran dll). Beberapa syarat untuk penanganan ini antara lain:

- a. Mempunyai bukti pemilikan/penguasaan atas lahan yang ditempatinya
- b. Tingkat kekumuhan tinggi dengan kesediaan lahan yang memadai untuk menempatkan prasarana dan sarana dasar.
- c. Tata letak permukiman tidak terpola.

Sedangkan untuk permukiman dengan status tanah ilegal maka pola penanganan yang dilakukan adalah permukiman kembali atau Pembangunan Rumah susun.

Model Pembangunan Rumah Susun.

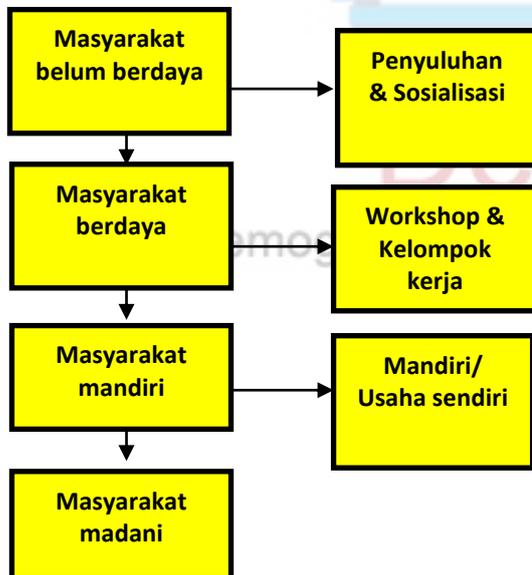
Untuk permukiman di Kelurahan Talang Putri Plaju dengan status tanah ilegal penataan yang dilakukan adalah dengan merelokasi permukiman ke lahan yang legal untuk dibangun permukiman baru salah satunya dengan pembangunan rumah susun. Lahan yang digunakan selain untuk pembangunan rumah susun juga di harapkan mampu memenuhi pembangunan sarana dan prasarana bagi kehidupan pemukim. Sarana prasarana tersebut antara lain jaringan listrik, sarana air bersih, TPS, MCK umum, jaringan limbah, taman, jalan lingkungan dan sarana perniagaan (warung, ruko). Rumah susun tersebut perlu adanya kejelasan status hak guna bangunan bagi masyarakat yang akan mengghuni rumah susun tersebut. Hal ini dapat melibatkan campur tangan Pemerintah dalam pengupayaan surat hak guna bangunan tersebut.

Disamping itu Pemerintah juga bergerak lebih jauh dengan memberikan jaminan bank pemberi kredit untuk KPR dari masyarakat yang membeli rumah yang dibangun Pemerintah. Selain itu Masyarakat diharapkan melakukan sharing pembiayaan dengan melakukan kewajiban pembayaran cicilan rumah secara rutin dan tidak menunggak, karna akan menimbulkan permasalahan dari penjamin Pemda yang akan berpotensi mengurangi kreadibilitas penjamin sehingga mengurangi kesempatan KPR berikutnya. Dukungan lembaga swadaya seperti LPMK, BPM, juga RT/RW setempat merupakan hal-hal yang dapat menambah keberhasilan program yang diharapkan

Tahap Perencanaan

1. Penegasan Hak Kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh masyarakat.
2. Pemberian sosialisasi program peremajaan dan penyuluhan secara intens khususnya pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah.

Skema tahap perencanaan penataan permukiman kumuh di Kelurahan Talang Putri Plaju.



Sumber : Hasil Analisis Lapangan (Peneliti)

Tahap Peiaksanaan

1. Memberikan informasi secara intens pada masyarakat
2. Melibatkan masyarakat pendatang baru di permukiman kumuh Wilayah

Kecamatan Plaju Kelurahan Talang Putri untuk terlibat dalam kerja bakti.

3. Memberdayakan peran lembaga Badan Keswadayaan Masyarakat secara lebih dalam melakukan evaluasi rutin dalam mengontrol pemeliharaan hasil program.

Tahap Penataan Jangka Pendek

1. Perlu adanya upaya perbaikan fisik drainase melakukan pengerukan sampah yang menghambat aliran air, penambahan saluran drainase di titik yang belum tersedia dimana pemerintah yang memfasilitasi baik secara dana dan barang, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat.
2. Perlu adanya perbaikan kondisi aksesibilitas dengan melakukan penerasan jalan
3. Perlu diadakannya tempat pembuangan sampah (TPA) sehingga masyarakat di Kelurahan Talang Putri tidak lagi membuang limbah padat di sekitar rumah.
4. Perlu diadakannya perencanaan tentang jaringan distribusi dari Perusahaan air minum (PAM) untuk mengatasi belum tersedianya suplai air bersih di Kawasan Permukiman kumuh di Kelurahan Talang Putri.

Tahap Penataan Jangka Panjang

FISIK

1. Penataan dan restrukturisasi kawasan dengan pola *Land Consolidation* (LC) atau *Land Sharing* (LS)
2. Restorasi untuk perumahan dan pemukiman yang bermasalah dalam pola tata letak pemukiman Diperuntukkan bagi rumah ilegal (*squater*)
3. Untuk menunjang optimalisasi pemanfaatan lahan dengan kawasan kerentanan sangat tinggi yaitu pengembangan rumah susun sederhana dan secara bertahap merelokasi sebagai masyarakat ke rumah susun. Pelaksanaan ini akan melibatkan pemerintah Kota Palembang melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai pelaksana, dengan melalui system kredit (KPR) Bank untuk mendukung pendanaan bagi masyarakat yang ingin membeli rumah.
4. Pembangunan jalan Desain Jalan: Jalan paving blok
5. Pengembangan tempat produksi "Industri Rumah" Pembangunan MCK Umum

6. TPS/composting TPS dilengkapi dengan sarana composting dan 3R (*reuse, reduce, dan recycle*) Sarana komposting dan 3 R di buat permanen berupa bak

Strategi penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Talang Putri, disini kekuatan pemerintah/publie investment sangat dominan. Di kawasan kumuh wilayah perencanaan keterlibatan pemerintah diwujudkan dengan pemberian bantuan melalui program yang dibiayai dan APBD, ADD, PNPM dan lainnya.

NON FISIK

Aspek non fisik merupakan aspek yang sama pentingnya dengan aspek fisik dalam mendukung keberhasilan program. Aspek non fisik berupa:

- a) Aspek ekonomi dan sosial. Pada aspek ekonomi diberikan beberapa penekanan seperti pemberdayaan ekonomi, pembiayaan, cara-cara berdagang, pelatihan sikap terhadap lingkungan, pelatihan keterampilan (jahit menjahit, kerajinan) pertukangan (Listrik, TV, Radio, Kulkas)
- b) Pelatihan usaha
Pelatihan usaha diarahkan untuk membuka usaha baru dan atau mengembangkan usaha masyarakat yang selama ini sudah berjalan.

KESIMPULAN

Kelurahan Talang Putri Plaju Palembang sebagai kawasan kumuh dilihat dari beberapa indikator kawasan permukiman kumuh yang terdiri dari beberapa parameter fisik dan non fisik. Adapun secara fisik dapat terdiri dari kepemilikan rumah, kondisi bangunan, Jenis bangunan, kepadatan bangunan, air bersih, MCK, drainase, dan Jalan Lingkungan sedangkan untuk kondisi Non fisik terdiri dari kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Jika di lihat dari tingkat Kekumuhani Kelurahan Talang Putri Plaju tergolong sebagai kawasan kumuh berat, hal ini di Sebabkan karna faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan, tingkat Ekonomi, minimnya sarana dan prasarana.

Berdasarkan Karakteristik baik dari segi Fisik maupun Non Fisik di Kelurahan Talang Putri Plaju, maka penataan kawasan kumuh dapat dilakukan dengan Peremajaan dimana dengan status tanah legal Untuk model penanganannya dapat dilakukan dengan Model Land Sharing serta perbaikan jalan lokal, drainase, TPS, sanitasi, dan akses air bersih

sedangkan untuk tanah ilegal menggunakan model pembangunan rumah susun.

SARAN

Bagi Pemerintah

Melihat kondisi permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Talang Putri Plaju dan dari hasil kajian beberapa karekteristik fisik dan non fisik yang muncul pada kawasan permukiman kumuh ini antara lain adalah perlu adanya kesesuaian terhadap rencana tata ruang. Dari aspek bangunan perlu adanya penataan pembangunan permukiman di Kelurahan Talang Putri Plaju Palembang, perlu diadakannya perbaikan sarana dan prasarana baik itu MCK umum yang memadai, TPA, Sistim drainase Menyiapkan hidran air dan untuk jangka panjang Perlu adanya Penyediaan rumah murah bagi masyarakat di permukiman kumuh. Salah satu alternatifnya adalah Rumah Susun (Rusun) yang dalam hal ini bisa disediakan oleh Pemerintah Kota dan swasta. Untuk swasta perlu adanya pemberlakuan insentif dan disinsentif. Dari Aspek Ekonomi, Memberikan pelatihan kepada masyarakat yang memang ingin meningkatkan pekerjaan sambil dengan adanya bantuan dari UKM (Usaha kecil masyarakat), dengan meningkatnya ekonomi maka dengan sendirinya mereka mampu meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggalnya.

Bagi Masyarakat Setempat

- a. Pemuka/tokoh masyarakat/Ketua RT setempat perlu mengadakan jadwal rutin kegiatan kebersihan lingkungan permukiman bagi tiap-tiap penghuni, sehingga meskipun sebagian besar penghuni berstatus "sewa" tetap berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan tempat mereka tinggal.
- b. Bersedia memelihara dan menjaga segala bentuk sarana dan prasarana yang disediakan dan menggunakannya secara arif bijaksana, Mematuhi segala bentuk kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan.

DAFTAR PUSAKA

- Bintoro, R. 1984. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Broadbent, Geoffrey.,1973, *Design in Architecture:Architecture and Human Sciences.*

Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal. 2006. *Panduan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kota.* Dirjen Cipta Karya.

Dewanta, A. 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan Di Indonesia.* Aditiya Media : Yogyakarta.

Khomarudin, 1997, *Lingkungan Permukiman Kumuh, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama*

Marwati Gundhi, 2008 *Jurnal Peremajaan Permukiman Melalui keswadayaan Masyarakat*

Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh. Dirjen Cipta Karya.

Hariyanto, A. 2006. *Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan sehat.*

Suparlan, Supardi. 1995. *Kemiskinan di Perkotaan.* Sinar Harapan dan Yayasan Obor, Jakarta.

Zahnd, Marcus. 1999, *Perancangan Kota Terpadu.* Pustaka Pelajar : Yogyakarta



DeJoS

Demography Journal of Sriwijaya

MODEL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT

Wiwik Puji Mulyani¹, Tri Winarni², Harsoyo³, Nurhadi⁴

^{1,2,3,4} Kependudukan Universitas Gajah Mada Yogyakarta

mulyaniwp@gmail.com

ABSTRAK, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat dan jenis kekerasan terhadap anak-anak serta hal-hal yang mempengaruhinya. Penelitian ini juga diharapkan menghasilkan model perlindungan terhadap anak. Daerah penelitian yang dipilih adalah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang dianggap memiliki tingkat kekerasan anak yang relatif rendah dan NTT sebagai daerah dengan tingkat pelecehan anak yang tinggi. Penelitian ini menggunakan metode *mix method*, yaitu secara kuantitatif maupun kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, wawancara mendalam dan *focus group discusstion* (FGD). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pola asuh anak adalah salah satu yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak. Selain itu masih terdapat norma dan nilai-nilai dalam masyarakat yang tidak sepenuhnya mendukung perlindungan anak baik di DIY maupun di NTT walaupun jenis dan tingkatnya berbeda. Dari sisi anak pun perlu ditingkatkan pemahaman dan kemampuan untuk menjaga diri sehingga dapat terhindar dari kekerasan. Diperlukan partisipasi secara terpadu dari berbagai pihak untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak dan ini dapat mengacu pada model perlindungan anak sebagai salah satu acuan mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap anak.

Kata kunci: Model, Perlindungan, Kekerasan anak, Berbasis masyarakat

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan tugas Negara, hal ini tertuang dalam UUD 1945 pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat pada pasal 28 B yang berbunyi " setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hal ini menjelaskan bahwa Negara mempunyai peran penting dalam melindungi dan mensejahterakan kehidupan anak.

Dewasa ini banyak sekali fenomena memprihatinkan yang menimpa anak-anak. Salah satunya adalah tindak kekerasan yang semakin menjadi persoalan yang memprihatinkan bagi bangsa ini. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. "Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus. Kasus terbesar adalah pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga april 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya, kasus

pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan *cybercrime* 1032 kasus.

Anak yang mengalami kekerasan sudah pasti mengalami trauma baik fisik maupun psikis. Anak yang mengalami kekerasan pada masa lalunya berpotensi akan melakukan hal yang sama saat mereka dewasa. Hal ini akan sangat memperhatikan untuk kelangsungan moral penerus bangsa. Banyak peneliti yang telah membahas tentang kekerasan anak, beberapa diantaranya: 1) Nurul Huda (2008) dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana penanganan terhadap kekerasan yang terjadi pada anak serta upaya lanjutannya. 2) Hasanah dan Raharjo (2016) penelitian ini membahas tentang penanganan kekerasan anak berbasis masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti focus kepada penanganan kekerasan anak yang membutuhkan kerjasama berbagai elemet masyarakat. 3) Purnama Rozak (2013) penelitian ini membahas tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah